

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Upaya pemerintah dalam mencapai sistem tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) dilakukan dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara (Lumenta et al., 2021). Transparansi pengelolaan keuangan negara terwujud dalam bentuk keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran daerah. Dalam prinsip ini, anggota masyarakat memiliki hak untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan bersama. Sementara itu, untuk akuntabilitas pengelolaan keuangan negara terwujud dalam bentuk pertanggungjawaban atas proses penganggaran, mulai dari perencanaan, penyusunan, hingga pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tetapi juga berhak menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran (Ujianto et al., 2017). Prinsip transparansi dan akuntabilitas ini menjadi dasar dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan tersebut nantinya akan dijadikan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan di periode selanjutnya (Finishtya & Safitri, 2023).

Laporan keuangan pemerintahan terdiri dari Laporan Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Finansial. Laporan Pelaksanaan Anggaran meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) sedangkan Laporan Finansial meliputi Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) (Finishtya & Safitri, 2023). Dalam laporan posisi keuangan terdapat akun persediaan yang menarik untuk diamati (Finishtya & Safitri, 2023). Persediaan merupakan akun aset yang fleksibilitasnya tinggi, karena digunakan dalam kegiatan operasional. Akun

persediaan berisiko tinggi jika pengelolaannya tidak tepat (Finishtya & Safitri, 2023).

Menurut PSAP No.5 Tentang Akuntansi Persediaan, persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Tujuan PSAP No.05 ini untuk mengatur perlakuan akuntansi persediaan dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan. Standar ini mengatur perlakuan akuntansi pemerintah pusat dan daerah yang meliputi pengakuan, pengukuran pencatatan, dan pengungkapan. Salah satu satuan kerja pemerintah daerah yang harus berpedoman pada PSAP No.05 adalah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

Menurut PMK Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, puskesmas juga memerlukan pencatatan persediaan yang baik sebagai penunjang kegiatan operasional pelayanannya. Persediaan puskesmas meliputi bahan medis dan barang habis pakai. Menurut PMK Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas Bahan medis meliputi obat-obatan dan barang habis pakai meliputi alat kesehatan yang ditunjukkan untuk penggunaan sekali pakai (*single use*) yang daftar produknya diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Penelitian Umboh & Tinangon (2021) menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan Manado memiliki dua jenis persediaan yaitu berwujud perlengkapan dalam jenis obat-obatan dan ATK yang dimanfaatkan untuk mendukung operasional instansi pemerintah. Hasil pada penelitian tersebut menunjukkan keesuaian dengan PSAP No.05. Selain itu, hasil penelitian atas indikator pengakuan persediaan, pengukuran persediaan, dan pengungkapan sejalan dengan ketentuan yang ada di PSAP No.05. Penelitian Simanjuntak et

al., (2023) menunjukkan bahwa Penerapan akuntansi persediaan pada Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat untuk Klasifikasi, Pengakuan, Pengukuran, Beban Persediaan, dan pengungkapan persediaan sudah sesuai dengan PSAP No.05 tentang Persediaan.

Penelitian ini dilakukan pada salah satu instansi milik pemerintahan yaitu Puskesmas Umbulsari. Persediaan pada puskesmas yaitu barang habis pakai, obat-obatan, dan alat perlengkapan medis. Persediaan ini digunakan untuk menunjang jalannya kegiatan operasional puskesmas sehingga akan dilakukan pengadaan tiap bulan. Jika persediaan tidak tersedia maka dapat membuat puskesmas kesulitan untuk memberikan pelayanan ke masyarakat dan akhirnya kegiatan dalam puskesmas akan terganggu. Beberapa penelitian sebelumnya merefleksikan pentingnya kesesuaian perlakuan akuntansi persediaan suatu instansi pemerintah. Puskesmas Umbulsari dipilih sebagai obyek penelitian karena belum ada penelitian terkait akuntansi persediaan di puskesmas. Pada proses pencatatan persediaan di puskesmas umbulsari pernah terjadi selisih antara jumlah persediaan di kartu stock dengan jumlah di stock opname.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas mengenai pentingnya perlakuan akuntansi persediaan berdasarkan PSAP No 05 pada puskesmas. Maka penelitian ini berjudul **“Analisis Perlakuan Akuntansi Persediaan Berdasarkan PSAP No.05 Pada Puskemas Umbulsari Kabupaten Jember”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat disusun dalam penelitian ini yaitu **“Bagaimana Perlakuan Akuntansi Persediaan Berdasarkan PSAP No.05 Pada Puskesmas Umbulsari Kabupaten Jember?”**.

### **1.3 Tujuan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk Menganalisis Perlakuan Akuntansi Persediaan Berdasarkan PSAP No. 05 Pada Puskesmas Umbulsari Kabupaten Jember.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peneliti tentang perlakuan akuntansi persediaan berdasarkan PSAP 5 Tentang persediaan.

#### 2. Manfaat Bagi Puskesmas.

Penelitian ini diharapkan untuk membantu pengurus persediaan di puskesmas dalam mengelolaa persediaan puskesmas dengan baik dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan menambah pemahaman mengenai pentingnya perlakuan akuntansi persediaan berdasarkan standar yang telah ditetapkan.

#### 3. Manfaat bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan untuk memberikan gambaran mengenai perlakuan akuntansi persediaan berdasarkan PSAP 5 pada pemerintahan khususnya pada puskesmas dan menambah pemahaman peneliti selanjutnya mengenai pentingnya perlakuan akuntansi persediaan berdasarkan PSAP 5 Tentang Persediaan.